



## Keterbatasan Pendidikan dan Kerentanan Remaja pada Fase *Post-Compulsory Education*: Analisis Rekrutmen Boko Haram di Nigeria

Syakinah Azalea Aniqah<sup>1\*</sup>, Imam Fadhil Nugraha<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan km. 10 Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [syakinahazaleaniqah@gmail.com](mailto:syakinahazaleaniqah@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the impact of the state's structural failure in the education sector on the vulnerability of adolescents in Northern Nigeria to recruitment by Boko Haram. Using an explanatory qualitative method based on secondary data, this issue is analyzed through the theoretical frameworks of Structural Violence and Human Security. The findings reveal that high dropout rates during the post-compulsory education phase create a critical sense of insecurity. Although the government has sought to mitigate conflict through traditional state security approaches such as military operations and reintegration programs—these reactive measures have proven ineffective in addressing the root causes of the problem. The sudden cessation of educational protection demonstrates that the state has created conditions of institutional abandonment. This unaddressed vacuum has triggered multidimensional deprivation such as identity crises, social alienation, and economic frustration and contributed to exploitation by Boko Haram, which acts as a substitute provider of basic needs. This paralysis of the educational infrastructure ultimately constitutes a form of structural violence that actively fuels transnational security threats. Therefore, a paradigm shift in policy toward human security is urgently needed, particularly through the integration of vocational education to expand the safety net of education, the reformulation of affirmative post-conflict programs, and the enforcement of distributive justice.*

**Keywords:** *Boko Haram; Human Security; Institutional Vacuum; Post-Compulsory Education; Structural Violence.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kegagalan struktural negara dalam sektor pendidikan terhadap kerentanan remaja di Nigeria Utara dari rekrutmen kelompok Boko Haram. Dengan menggunakan metode kualitatif eksplanatoris berbasis data sekunder, permasalahan ini dianalisis melalui kerangka teori Kekerasan Struktural (*Structural Violence*) dan Keamanan Manusia (*Human Security*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka putus sekolah pada fase pasca pendidikan wajib (*post-compulsory education*) menimbulkan insecurities yang fatal. Meskipun pemerintah berupaya meredam konflik lewat pendekatan keamanan tradisional (*sate security*) melalui operasi militer dan program reintegrasi, kenyataannya langkah reaktif tersebut terbukti gagal menyentuh akar persoalan. Penghentian perlindungan pendidikan secara mendadak membuktikan bahwa negara telah menciptakan kondisi pengabaian institusional (*institutional abandonment*). Kondisi vakum yang tidak ditangani secara baik ini telah memicu deprivasi multidimensional seperti krisis identitas, keterasingan sosial dan frustrasi ekonomi serta berkontribusi pada eksploitasi oleh kelompok Boko Haram yang hadir sebagai aktor substitusi penyedia kebutuhan dasar. Kelumpuhan infrastruktur pendidikan ini pada akhirnya merupakan bentuk kekerasan struktural yang secara aktif memproduksi ancaman keamanan transnasional. Oleh karena itu, pergeseran paradigma kebijakan menuju human security sangat mendesak dilakukan, khususnya melalui integrasi pendidikan vokasi untuk memperluas jaring pengamanan pendidikan, reformulasi program pasca konflik yang afirmatif, serta penegakan keadilan distributif.

**Kata kunci:** Boko Haram ;Human Security; Kekerasan Struktural; Post Compulsory Education; Vakum Institusional.

### 1. LATAR BELAKANG

Dimensi keamanan internasional kontemporer telah mengalami pergeseran yang signifikan, dari awalnya berfokus pada kekuatan militer (tradisional) mengarah pada kemanan non-tradisional, khususnya *human security* (keamanan manusia). Paradigma ini menjadikan individu sebagai fokus utama keamanan, artinya kapasitas sebuah negara tidak lagi diukur melalui kekuatan militernya, tetapi dari sejauh mana kemampuan negara dalam menjamin

kebutuhan hak dasar warganya, termasuk akses terhadap pendidikan. Mengacu pada kerangka tersebut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana fase transisi pendidikan di Nigeria serta bagaimana celah tersebut dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis transnasional. Dalam perspektif *human security*, kegagalan negara menyediakan infrastruktur pendidikan yang memadai bukan sekadar persoalan sosial, melainkan bentuk nyata dari insecurities struktural yang menjadi representasi nyata dari fenomena *weak state* (negara lemah). Ketidakmampuan negara dalam mengelola urusan domestiknya yang diperparah oleh lemahnya struktur institusi, pemerintahan yang korup, serta ketidakadilan sosial. Kondisi ini tidak hanya memicu instabilitas dalam negeri, tetapi juga menjadi akar dari ancaman keamanan lintas batas (Akowe, 2024, p. 14). Korupsi dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat secara langsung memicu lahirnya krisis keamanan dan terorisme domestik.

Realitas dari persoalan tersebut terlihat jelas di kawasan Afrika Barat, terutama Nigeria. Sebagai negara berkembang yang masih menghadapi tantangan konsolidasi institusional, Nigeria mengalami ketimpangan yang cukup parah dalam sektor pendidikan. Berdasarkan data *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) yang diulas oleh (Ogunode *et al.*, 2022, pp. 82–83) Nigeria merupakan penyumbang angka pendidikan anak putus sekolah tertinggi sekitar 20 juta anak dan mayoritas 33% terkonsentrasi di kawasan Timur Laut (*North East*) Utara. Data dari UNICEF menegaskan terdapat 10,5 juta anak putus sekolah di tingkat dasar dan 8,1 juta di tingkat menengah dengan 66% terkonsentrasi di wilayah Utara secara keseluruhan (UNICEF, 2022, p. 1). Tingginya angka tersebut mencerminkan bahwa persoalan pendidikan di Nigeria telah berubah menjadi bentuk kekerasan struktural yang menciptakan kondisi kerentanan (*human insecurity*) yang mendalam khususnya terhadap kondisi sosial dan keamanan masyarakat.

Ditengah krisis tersebut, terdapat satu fase transisi kritis yang seringkali terabaikan, yaitu masa pasca pendidikan wajib (*post-compulsory education*). Secara regulatif, melalui peluncuran program *Universal Basic Education* (UBE), pemerintah Nigeria telah berupaya menerapkan kebijakan pendidikan dasar wajib dan gratis untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah (Rasidi *et al.*, 2021, p. 46). Namun, pada kenyataannya, implementasi di lapangan sangat lemah dan diwarnai oleh disparitas yang parah. Kondisi fasilitas pembelajaran yang tidak merata, rendahnya kompetensi guru, hingga ketimpangan finansial yang membuat akses pendidikan tidak setara (Rasidi *et al.*, 2021, p. 43). Lebih buruk lagi, perlindungan ini terhenti secara sistematis tepat ketika remaja telah menginjak usia 15 tahun. Penghentian dukungan negara pada rentang usia transisional ini menciptakan sebuah *institutional vacuum*, yaitu situasi ketika para remaja dihadapkan oleh realitas keras, mereka kehilangan struktur

perlindungan negara secara mendadak, sementara di waktu yang bersamaan mereka belum memiliki kapasitas ekonomi dan kematangan sosial untuk bertahan mandiri.

Terputusnya akses menuju pendidikan lanjutan ini turut memicu dampak psikososial yang buruk. Padahal, remaja tersebut berada dalam tahap krusial untuk menemukan jati diri namun kenyataannya mereka dihadapkan dengan krisis identitas, krisis martabat dan keterasingan sosial. Kehilangan orientasi hidup dan makna diri inilah yang menempatkan mereka berada dalam titik kerentanan tertinggi. Alasan ini kemudian mendorong penelitian ini untuk menjadikan fase transisi tersebut sebagai fokus utama. Fase ini dipandang sebagai jendela kerentanan (*critical vulnerability window*) yang akan menentukan arah kehidupan remaja di kawasan konflik tersebut.

Tepat pada kondisi vakum institusional tersebut kemudian menciptakan *critical vulnerability window* yang memberikan celah lalu dimanfaatkan secara strategis oleh aktor non negara. Dalam konteks ini, Boko Haram hadir tidak lagi sebatas sebagai kelompok pemberontak domestik di Nigeria, tetapi telah berkembang menjadi jaringan ekstremisme transnasional yang beroperasi lintas batas hingga kawasan Danau Chad, mencakup Nigeria, Kamerun, dan Niger. Memanfaatkan celah kelemahan kapasitas negara, kelompok ini memposisikan diri sebagai penyedia keamanan alternatif bagi remaja yang terpinggirkan dari struktur sosial.

Tawaran yang diberikan oleh kelompok ini merupakan insentif finansial, secara krusial mereka mengintervensi krisis identitas dengan memfasilitasi rasa saling memiliki (*sense of belonging*) dan menyediakan saluran bagi krisis maskulinitas yang diakibatkan oleh hilangnya ruang sosial (Opene & Izu, 2025). Realitas empiris ini membantah asumsi *deterministik* yang memposisikan kemiskinan sebagai faktor tunggal penyebab terorisme. Sebaliknya, radikalisisasi yang terjadi di Nigeria Utara merupakan representasi dari respons agensi individu terhadap kelalaian struktural negara dalam memberikan ruang aman bagi warganya.

Berbagai literatur terdahulu telah menyoroti korelasi antara krisis pendidikan dan konflik di Nigeria, Studi yang ada seperti yang diulas oleh Mahdifa Afzal maupun Bertoni telah memberikan kontribusi dan pijakan penting dalam memetakan dampak konflik bersenjata terhadap tingginya angka putus sekolah. Namun, narasi yang dibangun oleh literatur tersebut cenderung terjebak pada ranah sosiologi domestik atau kajian pembangunan semata. Kelemahan mendasar dari literatur terdahulu adalah kecenderungan untuk memposisikan fenomena “putus sekolah” secara agregat dan murni sebagai dinamika internal. Mereka luput menjadikan fase transisi *post-compulsory education* sebagai kategori analisis utama yang

menghubungkan kegagalan infrastruktur negara dengan eskalasi ancaman keamanan transnasional.

Berangkat dari celah literatur tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggeser level analisis. Isu pendidikan tidak lagi dipandang sebatas problematika domestik, melainkan diposisikan sebagai variabel independen yang memicu reproduksi insecurities lintas negara. Argumentasi utama yang dibangun dalam tulisan ini adalah kegagalan struktural negara dalam memfasilitasi fase *post-compulsory education* telah menciptakan *institutional vacuum* (vakum institusional) yang menghasilkan *human insecurity* secara mendalam, yakni sebuah kondisi yang secara langsung menjadi celah bagi reproduksi keamanan lintas batas oleh kelompok ekstremis Boko Haram.

Penelitian ini menjadi penting untuk membuktikan bahwa kelumpuhan struktur pendidikan di negara berkembang dapat menjadi pintu masuk bagi aktor kekerasan global. Sebagai upaya pembuktian argumentasi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan utama yaitu bagaimana keterbatasan akses pendidikan pada fase *post-compulsory education* dapat menciptakan kerentanan *human security* yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis transnasional seperti Boko Haram dalam proses rekrutmen remaja di Nigeria Utara serta bagaimana absennya peran negara berimplikasi pada eskalasi ancaman transnasional.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Sebagai langkah awal untuk memperkuat justifikasi topik, penulis melakukan tinjauan literatur untuk melihat sejauh mana batas eksplorasi isu tersebut yang telah diteliti sebelumnya. Melalui penelusuran berbagai temuan yang ada, penulis dapat menentukan batasan masalah dan arah analisis yang berbeda untuk menawarkan kebaruan. Pada dasarnya, tinjauan ini berfungsi sebagai fondasi utama untuk menemukan celah penelitian (*research gap*). Sebagai titik awal, penulis menelusuri sejumlah literatur yang relevan dengan persoalan pendidikan, kerentanan sosial, dan dinamika ekstremisme di Nigeria untuk menegaskan posisi akademis penelitian. Dari penelusuran pustaka yang telah dilakukan, penulis mengerucutkan ulasan pada tiga literatur utama.

Literatur pertama dari (Afzal, 2020) yang berjudul *From “Western Education is Forbidden” To The World’s Deadliest Terrorist Group: Education and Boko Haram In Nigeria*. Afzal berupaya menjelaskan bagaimana penolakan terhadap pendidikan Barat di Nigeria Utara tidak dapat dilepaskan dari identitas agama dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat (Afzal, 2020, pp. 1–2, 18). Kajian ini membedah narasi anti-Barat yang

dikapitalisasi oleh Mohammad Yusuf untuk menarik dukungan masyarakat tertentu. Tulisan ini menjadi dasar pemahaman mengenai kemunculan ekstremisme tidak semata hadir dalam bentuk kekerasan fisik, namun juga melalui proses pembentukan narasi dan identitas kolektif. Walaupun demikian, celah pada studi Afzal memiliki kecenderungan yang terlampaui fokus pada retorika ideologi. Analisis yang dilakukan luput melihat kegagalan negara dan buruknya infrastruktur pendidikan belum dibahas secara mendalam.

Literatur selanjutnya dari (Bertoni *et al.*, 2019) "*Education is forbidden: The effect of the Boko Haram conflict on education in North East Nigeria*" lebih menitikberatkan pada pengukuran empiris mengenai dampak konflik Boko Haram terhadap sektor pendidikan di wilayah Timur Laut Nigeria. Tulisan tersebut menjelaskan secara kuantitatif bagaimana instabilitas keamanan berpengaruh langsung terhadap penurunan partisipasi sekolah dan memburuknya kondisi pendidikan masyarakat sipil (Bertoni *et al.*, 2019, p. 2,14). Tulisan ini berkontribusi dalam memberikan gambaran empiris yang sangat kuat mengenai besarnya kerusakan institusional yang ditimbulkan oleh konflik berkepanjangan. Namun celah penelitian ini terlihat dari posisinya yang lebih banyak menempatkan pendidikan dalam posisi sebagai dampak dari konflik semata. Akibatnya, hubungan timbal balik antara absennya jaminan pendidikan dengan reproduksi konflik belum dianalisis secara menyeluruh.

Sementara itu, kajian oleh (Opene & Izu, 2025) dengan judul "*Youth Unemployment and Violent Extremism in West Africa: Assessment of Nigeria's Dilemma*" mencoba melihat persoalan tersebut melalui perspektif teori deprivasi relatif serta frustrasi (Opene & Izu, 2025, pp. 195–196). Keduanya menyoroti keterkaitan antara tingginya angka pengangguran usia muda dengan meningkatnya kerentanan terhadap ekstremisme kekerasan (Opene & Izu, 2025, p. 190). Kajian ini memberikan kontribusi penting karena berhasil menghubungkan isu keamanan dengan rasa frustrasi sosial akibat marginalisasi ekonomi menjadi pintu masuk bagi radikalisisasi. Selain itu, tulisan ini juga memberikan evaluasi terhadap berbagai program intervensi pemerintah yang dinilai belum mampu menjawab akar persoalan secara berkelanjutan. Akan tetapi, celah dari literatur ini penggunaan kata "pemuda" yang dikategorikan menunjukkan rentang usia yang terlalu luas yakni 15-35 tahun yang menyebabkan penelitian ini belum memperlihatkan secara spesifik pada fase usia berapa kerentanan tersebut mulai terbentuk, sehingga dinamika hilangnya akses perlindungan negara saat remaja menuju bertansisi menuju dewasa luput dari pengamatan.

Sebagaimana yang telah dikaji dari beberapa literatur di atas, terlihat bahwa masing-masing telah memberikan kontribusi mengenai penjelasan yang cukup luas bagi keberlanjutan dari penelitian ini. Literatur-literatur tersebut cukup berkontribusi dalam menjelaskan melalui

pendekatan ideologis, empiris-kuantitatif, maupun psikologi sosial. Akan tetapi, masih terdapat ruang kajian yang belum banyak dibahas, khususnya mengenai keterhubungan antara ketiga dimensi tersebut dalam satu fase transisi sosial yang sama. Sebagian besar penelitian sebelumnya belum menempatkan fase *post-compulsory education* sebagai titik analisis utama, padahal di fase ini terjadi kondisi vakum institusional ketika remaja mulai kehilangan akses pendidikan dan perlindungan negara. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menempatkan fase transisi tersebut sebagai fokus utama analisis dengan menghubungkan konsep *human security* dan teori kekerasan struktural. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk melihat bagaimana hilangnya akses pendidikan pada usia transisi menjadi titik paling rentan dalam pembentukan insecurities individu di Nigeria.

Berdasarkan dari ulasan kajian literatur sebelumnya, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menggunakan kerangka teori *Structural Violence* dan *Human security* sebagai landasan utama. Kedua konsep ini diintegrasikan untuk melihat benang merah antara bagaimana keterbatasan akses pendidikan pada *post-compulsory education* di Nigeria melahirkan kondisi rentan yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis Boko Haram.

Dalam menelaah akar persoalan tersebut, pemikiran Johan Galtung menjadi dasar penting dalam penelitian ini. Galtung menjelaskan bahwa kekerasan tidak selalu dalam bentuk tindakan fisik yang terlihat secara langsung seperti perang, pembunuhan, ataupun konflik bersenjata. Kekerasan juga dapat bekerja secara tersembunyi melalui struktur sosial, politik, atau ekonomi yang dapat menyebabkan individu tidak mampu mencapai potensi hidupnya secara maksimal. Menurut Galtung, kekerasan struktural muncul ketika terdapat kesenjangan antara *potential realization*, yaitu kondisi ideal yang seharusnya dapat dicapai individu dengan *actual realization* atau realitas kehidupan yang benar-benar dialami akibat adanya hambatan struktural. Dengan kata lain, seseorang tidak hanya mengalami kekerasan ketika mendapatkan serangan langsung, tetapi juga ketika sistem sosial membatasi aksesnya terhadap pendidikan, peluang ekonomi, dan kesempatan sosial yang setara sehingga individu terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan keterbatasan sosial.

Ketika perspektif ini dilihat dalam konteks Nigeria Utara, maka terbatasnya akses pendidikan pada fase *post-compulsory education* dapat dipahami sebagai penggambaran nyata dari kekerasan struktural. Situasi tersebut mencerminkan kegagalan negara secara sistemik dalam menyediakan keberlanjutan pendidikan serta infrastruktur pendukung setelah masa wajib belajar berakhir. Ketika negara menghentikan jaminan pendidikan pada tahap tersebut, muncul kondisi yang disebut sebagai *institutional abandonment* atau pengabaian institusional.

Kondisi ini menggambarkan situasi ketika negara secara mendadak menarik perlindungan institusionalnya pada periode usia transisi yang sangat rentan dari sisi psikologis. *Institutional abandonment* yang muncul dari kekerasan struktural tersebut secara langsung meningkatkan ancaman terhadap *human security*.

Untuk menganalisis fenomena ini, penulis menggunakan perspektif yang dikemukakan oleh Johan Galtung mengenai *structural violence*. Berbeda dengan pemahaman umum yang selalu dikaitkan bahwa kekerasan terlihat jelas secara fisik (*direct violence*), Galtung melihat bahwa kekerasan juga sering kali bersembunyi di balik struktur sosial yang menciptakan ketidaksetaraan peluang hidup (*unequal life chances*) atau kerugian secara institusional (*institutional harm*). Dalam konteks Nigeria, ketimpangan akses pendidikan yang eksklusif dan tidak merata merupakan bagian dari warisan kolonial Inggris yang terbentuk melalui kebijakan *indirect rule*. Kebijakan tersebut secara historis membatasi perkembangan pendidikan formal di wilayah Utara dan pembangunan infrastruktur pendidikan lebih dipusatkan di wilayah Selatan. Akibatnya, muncul ketimpangan struktural antar wilayah yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan terus mempengaruhi distribusi pembangunan. Kondisi ketimpangan tersebut pada akhirnya terus memproduksi marginalisasi di Nigeria Utara, terutama dalam aspek pendidikan, ekonomi dan akses perlindungan sosial.

Lebih jauh lagi, kekerasan struktural yang diciptakan oleh negara tersebut kemudian menciptakan hubungan sebab akibat yang langsung memunculkan *human insecurity*. Ketika negara gagal menyediakan infrastruktur dan akses pendidikan berkelanjutan, terkhususnya ketika perlindungan pendidikan terhenti secara mendadak ketika remaja menginjak usia 15 tahun (*fase post-compulsory education*) maka terciptalah sebuah *institutional vacuum*. Pada titik ini, remaja yang berada pada fase transisi mengalami deprivasi yang mendalam, mereka kehilangan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan sementara mereka belum memiliki kapasitas ekonomi dan sosial untuk mandiri.

Namun, penelitian menghindari asumsi deterministik yang menyederhanakan bahwa kemiskinan atau putus sekolah akan melahirkan ekstremisme. Pada kenyataannya, proses radikalisis berlangsung jauh lebih kompleks karena berkaitan dengan kerentanan sosial, psikologis akibat kelalaian struktural negara. Insecuritas yang dialami oleh remaja tidak hanya menyangkut tentang keterbatasan ekonomi, tetapi juga hilangnya akses pendidikan dan ruang sosial yang memicu alienasi (keterasingan dari masyarakat), krisis identitas, serta krisis maskulinitas yang gagal melakukan perannya di tengah lingkungan masyarakat.

Kerentanan tersebut kemudian dimanfaatkan secara sistematis oleh kelompok ekstremis transnasional yaitu Boko Haram, untuk memperluas pengaruhnya. Mereka

memanfaatkan vakum institusional dengan menawarkan alternatif penyedia perlindungan dan keamanan bagi remaja. Daya tarik yang ditawarkan tidak hanya berbentuk finansial, melainkan juga menyediakan ruang sosial yang menghadirkan rasa kepemilikan bagi para remaja yang merasa diabaikan oleh negara. Oleh sebab itu, keterkaitan kedua konsep tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan dapat berkembang menjadi sumber kerentanan yang pada akhirnya memproduksi ancaman kekerasan transnasional.

Menarik benang merah dari keseluruhan uraian, penelitian ini memadukan pendekatan Kekerasan Struktural (*Structural Violence*) dan Keamanan Manusia (*Human Security*) untuk mengonstruksi rantai kausalitas di balik fenomena radikalisisasi. Secara teoritis, alur sebab akibat diawali oleh ketimpangan structural (*structural inequality*) yang secara aktif diproduksi oleh negara, sehingga menciptakan kerentanan. Ketimpangan ini bermanifestasi menjadi pengabaian institusional (*institutional abandonment*), yakni ketika jaminan pendidikan diberhentikan saat remaja menginjak fase *post-compulsory education*. Akibat dari pengabaian ini adalah munculnya kondisi insekuritas pada level individu (*human insecurity*). Ditengah kekosongan ini membuka celah bagi aktor non negara untuk melakukan eksploitasi kerentanan (*vulnerability exploitation*). Melalui celah inilah proses perekrutan ekstremis (*extremist recruitment*) terhadap kelompok remaja terjadi secara masif yang secara eskalatif melahirkan ancaman keamanan berskala transnasional (*transnasional insecurity*).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif eksplanatori (*explanatory qualitative scase study*) untuk memberikan penjelasan mengenai rumusan masalah. Pemilihan desain ini secara spesifik ditujukan untuk melihat hubungan kausal antara pengabaian institusi (*institutinal abandonment*) oleh negara dengan strategi rekrutmen kelompok ekstremis Boko Haram. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi pendidikan di kawasan Nigeria Utara, sekaligus menjelaskan mengapa keterbatasan pada fase *post-compulsory education* dapat menjadi celah bagi rekrutmen ekstremisme. Selain itu, interpretasi data juga menjadi bagian krusial dalam penelitian ini untuk menganalisis secara teoritis bagaimana vakumnya institusi tersebut dapat dieksploitasi oleh kelompok Boko Haram sebagai aktor transnasional.

Fokus analisis utama dalam penelitian ini terletak pada adanya ketimpangan pendidikan di kawasan Nigeria Utara serta strategi rekrutmen yang diterapkan oleh kelompok ekstremis Boko Haram. Untuk memperoleh informasi yang menyeluruh, teknik penelitian ini sepenuhnya memanfaatkan sumber data sekunder. Pemilihan data dilakukan secara terarah

dengan memfokuskan pada berbagai literatur akademik, laporan resmi lembaga internasional seperti UNESCO dan UNICEF, serta data statistik mengenai angka putus sekolah. Lebih spesifik, penarikan data difokuskan pada episentrum konflik di wilayah Borno, Yobe dan Adamawa, dengan menyoroti demografi pemuda dengan rentan dengan rentang usia 16-25 tahun, serta pola rekrutmen dan insentif yang ditawarkan oleh Boko Haram.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan yaitu, deskripsi, eksplanasi dan interpretasi. Tahap deskripsi digunakan untuk memetakan kondisi ketimpangan pendidikan di Nigeria berdasarkan data sekunder yang telah di kumpulkan, Selanjutnya, tahap eksplanasi dilakukan dengan menghubungkan dampak keterbatasan akses pendidikan pada *fase post-compulsory education* dengan strategi rekrutmen Boko Haram. Pada tahap ini, teori dioperasionalkan langsung terhadap data, kerangka *structural violence* digunakan sebagai instrumen analitis untuk membedah data mengenai kegagalan institusi negara, sementara kerangka *human security* digunakan untuk mengevaluasi data terkait krisis identitas dan eksklusi sosial yang dialami remaja. Terakhir, tahap interpretasi digunakan untuk menarik kesimpulan analitis sebagai temuan penelitian mengenai hubungan antara vakumnya peran negara dan meningkatnya kerentanan remaja terhadap ekstremisme.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Transformasi isu pendidikan dari sekadar agenda pembangunan sosial domestik menjadi persoalan keamanan internasional merupakan realitas tak terhindarkan dalam studi keamanan kontemporer. Saat negara absen dalam memfasilitasi perlindungan dan infrastruktur pendidikan, krisis insekuritas yang lahir di tingkat domestik dengan cepat melintasi batas negara (*spillover effect*). Kekosongan institusional dalam ranah pendidikan pada akhirnya membuka celah eksploitasi bagi jaringan teror transnasional, yang secara langsung mengekskalasi kelalaian domestik menjadi akar instabilitas keamanan di tingkat regional

#### **Fase Post Compulsory Education sebagai Vacuum Institutional dalam Produksi Kerentanan Remaja di Nigeria Utara**

Bagian Proses radikalisisasi dalam rekrutmen Boko Haram di Nigeria Utara kerap kali dijelaskan oleh studi- studi sebelumnya melalui variabel makro secara umum. Faktor-faktor seperti kemiskinan, tingginya pengangguran, sentimen keagamaan yang fanatik, serta lemahnya keamanan aparat negara, maka penelitian ini memilih sudut pandang yang berbeda. Meskipun pendekatan tersebut valid, pendekatan utama sering kali luput melihat bahwa kerentanan terhadap ekstremisme kekerasan tidak muncul secara tiba-tiba atau taken for

granted. Kerentanan tersebut melainkan diproduksi dan direproduksi melalui sebuah fase transisi sosial tertentu yang secara struktural diabaikan oleh negara.

Dalam konteks demografi Nigeria Utara, terdapat satu fase transisi yang menjadi akar dari permasalahan tersebut, yakni fase pasca wajib belajar (*post-compulsory education*). Fase ini bukan hanya sebagai penanda waktu di mana individu menyelesaikan pendidikan dasar, melainkan sebuah periode transisi yang krusial di mana remaja secara tiba-tiba tidak lagi berada dalam perlindungan institusi pendidikan formal, sementara di saat yang bersamaan mereka belum memiliki kapasitas ekonomi, sosial maupun stabilitas psikologis untuk mandiri. Secara statistik, besarnya skala pengabaian ini terlihat dari fakta bahwa wilayah Utara merupakan penyumbang angka putus sekolah tertinggi, dimana terdapat lebih dari 3,4 juta anak di kawasan *North West* dan 2 juta anak di kawasan *North East* yang tidak terserap oleh institusi pendidikan. (Nwoke *et al.*, 2024, p. 18). Situasi tersebut kemudian dapat menciptakan kondisi ketiadaan ruang sosial atau disebut sebagai *absence of social anchoring*. Artinya, muncul sebuah unsur ketiadaan yang fatal ketika remaja kehilangan akses terhadap institusi pendidikan lanjutan.

Ketiadaan tersebut termanifestasi melalui hilangnya rutinitas harian, legitimasi sosial di mata masyarakat, identitas kolektif sebagai pelajar serta yang paling fatal mereka kehilangan arah masa depan. Pada dasarnya fungsi sekolah tidak hanya dipahami sebagai ruang pendidikan akademik, melainkan juga sebagai instrumen integrasi sosial yang senantiasa mengikat individu agar tetap terhubung dengan norma dan struktur masyarakat. Ketika mekanisme tersebut terhenti akibat terputusnya akses terhadap pendidikan lanjutan, kerugian yang dialami bukan hanya hilangnya peluang belajar, tetapi hancurnya sistem perlindungan sosial itu sendiri (Ogunode *et al.*, 2022, p. 87).

Selama ini, keterbatasan pendidikan di Nigeria Utara kerap dilihat sebatas kegagalan aspek pembangunan (*development failure*), melainkan sebagai bentuk nyata dari kekosongan institusional yang terus memproduksi kerentanan keamanan manusia secara masif. Kekosongan institusional tersebut menciptakan ruang di mana remaja mengalami keterasingan sosial, mereka mengalami ketidakpastian identitas, frustrasi ekonomi, kehilangan pengakuan sosial dan krisis masa depan (Kukawa *et al.*, 2025, pp. 235–236). Krisis multidimensional tersebut merupakan prakondisi utama yang menjelaskan mengapa remaja tersebut menjadi bagian yang paling rentan direkrut oleh kelompok teror Boko Haram (Akowe, 2024, pp. 14–15).

Bukti empiris menunjukkan bahwa episentrum dari krisis kerentanan ini terkonsentrasi di kawasan Timur Laut Nigeria seperti Borno, Yobe dan Adamawa yang memang memiliki rekam jejak ketimpangan struktural paling parah. Kondisi ini terefleksi jelas

dalam data profil kemiskinan, presentase kemiskinan berdasar takaran pendapatan harian menyentuh angka 74,3% di Adamawa, 74,1% di Yobe, sementara beberapa estimasi menempatkan tingkat kemiskinan multidimensional di Borno telah berada pada level yang sangat kritis 76% (Ikpe *et al.*, 2023, p. 8). Kombinasi antara tingginya angka kemiskinan absolut dengan masifnya pengangguran pemuda menciptakan kondisi keputusan struktural yang kemudian dieksploitasi oleh kelompok Boko Haram.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa kemiskinan dan putusnya akses pendidikan tidak secara deterministik mengubah setiap remaja miskin menjadi seorang ekstremis. Bukti empiris secara tegas memperlihatkan bahwa mayoritas pemuda di kawasan konflik sesungguhnya tidak terlibat dalam kekerasan atau ekstremisme (Ikpe *et al.*, 2023, p. 19). Transformasi radikalisme ini baru termanifestasi secara nyata ketika kemiskinan absolut tersebut berpadu dengan krisis identitas dan eksklusi sosial yang mendalam, yang berakar langsung dari praktik marginalisasi oleh negara (Umar & Maaji, 2025, pp. 8–9, 16).

Kerentanan struktural ini sangat dipengaruhi oleh variabel usia. Berdasarkan data survei di Borno mengungkap sebuah fakta demografis yang kontras, remaja di rentang usia 16-35 tahun menjadi kelompok yang paling rentan terseret ekstremisme akibat himpitan kemiskinan, sedangkan kelompok usia 26-35 tahun secara signifikan lebih kebal terhadap radikalisasi (Ikpe *et al.*, 2023, pp. 21–24). Titik temu antara rentang usia krusial ini dengan berhentinya jaminan *post-compulsory education* bukanlah kebetulan semata. Pertemuan dua faktor ini membuka jendela kerentanan krisis (*critical vulnerability window*) berupa krisis identitas pemuda, sebuah celah yang akhirnya dimanfaatkan secara jeli kelompok Boko Haram.

Hilangnya perlindungan di fase pendidikan lanjutan ini memicu lahirnya sebuah paradoks yang sangat menguntungkan kelompok Boko Haram. Secara ideologis, mereka menentang kuat pendidikan Barat dan secara masif menghancurkan infrastruktur sekolah. Namun ironisnya, kelompok ini justru menjadi pihak yang paling diuntungkan dari kelumpuhan institusi pendidikan formal tersebut. Kontradiksi ini muncul karena kelompok Boko Haram pada dasarnya tidak sekedar bersikap anti-pendidikan, melainkan secara sadar mengonstruksi sebuah sistem legitimasi alternatif. Mereka dengan jeli memelintir sentimen kekecewaan publik atas korupsi dan kegagalan sistem pemerintahan Barat (Ishaku *et al.*, 2021, pp. 1–2). Tepat ketika remaja mengalami krisis eksklusi sosial dan putus sekolah, kelompok Boko Haram hadir tidak sekedar dengan pendekatan kekerasan fisik, melainkan mengeksploitasi agama melalui instrumentalisasi negatif untuk menyodorkan “pendidikan religius” versi mereka sendiri (Ishaku *et al.*, 2021, p. 2). Lebih dari sekedar doktrinisasi, kelompok ini mensubstitusi peran negara dengan menawarkan purifikasi spiritual, patronase

finansial, dan identitas kolektif perlawanan bagi kaum muda yang termarjinalkan OKNKWO HLM 4-6. Hal inilah yang membuat propaganda mereka sangat memikat dan mampu bertransformasi menjadi ancaman regional.

Dalam situasi kekosongan tersebut, kelompok Boko Haram hadir tidak sekadar menawarkan ideologi agama, tetapi juga menyediakan kebutuhan dasar yang secara struktural gagal diberikan oleh negara (Musa, 2025, pp. 300, 306). Kegagalan negara tersebut mencakup hilangnya rasa memiliki, solidaritas sosial, perlindungan, identitas kolektif, hingga peluang ekonomi alternatif yang paling umum dibutuhkan oleh remaja (Nwoke *et al.*, 2024, p. 22). Sebagai aktor Non Negara Kekerasan (*Violent Non-State Actors*), kelompok Boko Haram secara jeli mengeksploitasi ruang kosong yang ditinggalkan oleh negara akibat absennya kehadiran institusi dalam menjamin pendidikan lanjutan dan perlindungan sosial bagi remaja yang terpinggirkan (Musa, 2025, pp. 300–306). Dalam konteks ini, Boko Haram hadir dengan menyediakan rasa saling memiliki (*sense of belonging*), solidaritas sosial di tengah penderitaan, identitas kolektif baru, perlindungan fisik, hingga insentif ekonomi.

Oleh karena itu, kelompok Boko Haram bukan hanya sebuah organisasi kekerasan, dan keberhasilan rekrutmen kelompok Boko Haram sangat berkaitan erat dengan kelalaian negara. Boko Haram secara efektif menempatkan posisinya sebagai “aktor substitusi sosial” sebuah entitas yang mengambil alih peran negara dalam mengisi kekosongan institusional pada fase transisi remaja. Secara teoretis, analisis ini mempertemukan konsep *Structural Violence* dengan *Human Security*. Kekerasan struktural tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai kemiskinan atau ketimpangan wilayah semata, melainkan termanifestasi dalam wujud kegagalan institusional negara dalam mengelola fase transisi kehidupan masyarakat muda. Pengabaian ini menjadi semakin buruk akibat absennya tekad politik (*political will*). Kondisi tersebut secara jelas dibuktikan oleh realitas bahwa beberapa negara bagian di kawasan Utara seperti Borno dan Kano hingga saat ini belum meratifikasi Undang-Undang Hak Anak (*Child Rights Act*) ke dalam regulasi lokal mereka (Ogunode *et al.*, 2022, p. 84). Ancaman keamanan utamanya yang terjadi di negara-negara berkembang atau bahkan negara tertinggal (*Global South*) pada akhirnya terbukti tidak hanya lahir dari konflik bersenjata, tetapi berakar kuat dari keruntuhan sistem perlindungan sosial pada level yang paling mendasar.

### **Pendidikan Sebagai Arena Keamanan: Pergeseran Paradigma State Security Menuju Human Security**

Implikasi dari kekosongan institusional pada fase pendidikan tersebut menuntut adanya perubahan terhadap cara pandang tradisional dalam melihat isu keamanan nasional. Kajian ini secara tegas menempatkan sektor pendidikan tidak hanya sekadar pelengkap

instrumen pembangunan ekonomi atau alat peningkatan kualitas sumber daya manusia, melainkan sebagai kawasan utama dalam produksi keamanan maupun ketidakamanan itu sendiri. Dalam dinamika konflik di Nigeria Utara, akses terhadap pendidikan telah bertransformasi menjadi ruang politik keamanan yang sangat krusial dalam menentukan arah stabilitas sosial masyarakat.

Pemerintah Nigeria hingga saat ini masih berpegang pada pendekatan keamanan tradisional (*state security*), yang menganggap bahwa ancaman terbesar bagi kedaulatan negara bersumber dari elemen militeristik dan asimetris, seperti pemberontakan bersenjata kelompok Boko Haram. Sebagai bentuk terhadap krisis, memicu respons yang reaktif, pemerintah menggelar beragam operasi militer berskala masif, memperketat patroli bersenjata, dan membentuk satuan tugas khusus anti teror. Manifestasi dari praktik militeristik ini terlihat melalui strategi keamanan di berbagai lapisan. Pada lingkup domestik, hal tersebut ditunjukkan dengan pembentukan *Civilian Joint Task Force* (CJTF), pada lingkup regional, pemerintah menjalin kerja sama dengan negara-negara Uni Afrika melalui pembentukan *Multinational Joint Task Force* (MNJTF) (Woelandari dkk., 2021, pp. 76–77). Langkah ini bahkan diperluas dengan menggalang intervensi militer dari Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis (Anggaraa & Mahesa, 2024, pp. 107–108). Sebagai penunjang persenjataan pasukan tersebut, pemerintah menaikkan anggaran militer secara fantastis, dari USD 625 juta pada 2010 menjadi USD 6,25 miliar pada 2014 (Woelandari dkk., 2021, p. 76).

Meskipun demikian, langkah tersebut pada kenyataannya tidak mampu mengurai inti permasalahan. Akar kerentanan paling mendasar di wilayah Nigeria Utara sebenarnya terletak pada dimensi non militer yaitu kegagalan struktural negara dalam menjamin keamanan pendidikan bagi masyarakat terutama terhadap generasi mudanya. Munculnya insekuritas ini bukanlah suatu fenomena yang bersifat alamiah. Sebaliknya, kondisi tersebut secara langsung direkayasa oleh struktur kekuasaan negara melalui kebijakan yang tidak merata. Negara memegang kendali penuh dalam memilah kelompok masyarakat mana yang berhak memperoleh jaminan keamanan termasuk pendidikan dan kelompok mana yang dibiarkan terpinggirkan (Lendvai Bainton *et al.*, 2026, p. 454).

Dalam perspektif *human security*, ketidakmampuan negara dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang memadai dipandang sebagai bentuk insekuritas yang berpotensi menciptakan instabilitas domestik yang merambat menjadi krisis keamanan regional. Kegagalan struktural tersebut jelas terlihat dari rendahnya komitmen pendanaan dari negara. Pemerintah Nigeria tercatat hanya menyisihkan 5,6% hingga 7,5% anggaran nasional untuk sektor pendidikan, teramat sangat jauh dari batas 15-20% yang direkomendasikan oleh

UNESCO (Nwoke *et al.*, 2024, p. 16). Situasi ini bertambah parah saat sarana pendidikan diserang secara masif. Kelompok Boko Haram mendoktrin ideologi bahwa pendidikan Barat adalah haram, semata-mata untuk mencari pembenaran atas aksi penculikan massal dan penghancuran fasilitas belajar (Woelandari *et al.*, 2021, p. 78). Akibatnya, sektor pendidikan sangat hancur, sekitar 2.900 sekolah terdampak, ratusan guru tewas terbunuh, dan lebih dari 19.000 tenaga pendidik terpaksa mengungsi (Nwoke *et al.*, 2024, p. 19).

Fenomena tersebut menegaskan bahwa lemahnya kapasitas negara dalam merespons tuntutan internal masyarakatnya pada akhirnya bertindak sebagai akar pemicu meluasnya ancaman keamanan lintas batas. Ancaman terhadap individu tidak lagi dapat didefinisikan secara sempit sebagai bentuk kekerasan fisik, tetapi juga mencakup segala kondisi yang menghilangkan kemampuan individu untuk hidup secara aman dan bermartabat (Kusuma, 2022, p. 14). Ketika remaja kehilangan akses menuju pendidikan *post compulsory*, mereka tidak hanya kehilangan kesempatan untuk sekolah, tetapi mereka juga kehilangan akses terhadap mobilitas sosial, peluang ekonomi, legitimasi sosial, dan harapan masa depan.

Rangkaian deprivasi tersebut menghasilkan kondisi *human insecurity* yang bersifat multidimensional. Artinya, remaja tidak hanya mengalami kerentanan ekonomi, tetapi mereka juga mengalami kecemasan sosial, keterasingan identitas, perasaan tidak berarti, dan hilangnya orientasi masa depannya (Musa, 2025, pp. 52–54). Oleh sebab itu dalam konteks ini, pendidikan menjadi bagian dari infrastruktur keamanan manusia itu sendiri. Ketika pilar pendidikan itu lemah, maka keamanan individu turut melemah. Kegagalan sistem pendidikan berubah wujud menjadi produsen insecurities yang sama berbahayanya dengan konflik bersenjata itu sendiri.

Negara tidak hanya sekadar gagal melindungi masyarakat dari kelompok ekstrem Boko Haram, tetapi negara secara struktural kebijakannya secara aktif memproduksi prakondisi yang memungkinkan ekstremisme berkembang. Dampak buruk dari pendekatan *state centric* tersebut rupanya tidak hanya berhenti pada saat eskalasi konflik saja, tetapi merambat hingga ke penyelesaian pasca konflik. Ketidakmampuan negara dalam melakukan intervensi menjadi cerminan nyata atas gagalnya penanganan insecurities domestik. Sebagai contoh, peluncuran *Operation Safe Corridor* (OSC) oleh pemerintah yang awalnya dirancang untuk deradikalisasi dan reintegrasi eks-kombatan justru berbalik arah menjadi sebuah kegagalan institusional. Pada akhirnya, program ini malah menumbuhkan insecurities lanjutan dan kecurigaan sosial yang baru di tengah masyarakat (Akinyetun *et al.*, 2025, pp. 268–269).

Dominasi pendekatan *state centric* yang berjalan secara eksklusif tersebut pada akhirnya memantik kecurigaan dan resistensi keras dari masyarakat. Reintegrasi mantan

kombatan ke dalam masyarakat digambarkan sebagai “mimpi buruk” (*a nightmare*) oleh komunitas terdampak, mengingat mereka diabaikan dalam proses pemulihan trauma kolektif tersebut (Ike *et al.*, 2022, pp. 15–18). Masyarakat merasa program ini sangat tidak adil karena para korban sipil harus bertahan di tengah krisis dan menyaksikan dana negara justru disalurkan untuk membiayai teroris yang pernah menghancurkan hidup mereka (Ogunnubi & Aja, 2022, p. 11).

Kredibilitas negara menjadi hancur akibat disparitas untuk memberikan fasilitas kehidupan bagi para mantan pelaku kekerasan, sementara remaja yang kehilangan akses pendidikan justru terus diabaikan tanpa adanya kompensasi maupun pemulihan psikososial (Akinyetun *et al.*, 2025, pp. 277–278). Ketimpangan pasca konflik pada akhirnya hanya akan memperparah rasa keterasingan struktural, dan kembali membuka siklus kerentan baru bagi generasi muda di Nigeria Utara. Disparitas dalam alokasi perhatian negara inilah yang pada akhirnya menghancurkan kepercayaan publik, menggagalkan efektivitas deradikalisasi serta merawat rantai insekuritas transnasional.

Ancaman keamanan yang mencengkram Nigeria Utara bukan hanya berasal dari kelompok ekstremis Boko Haram, tetapi lahir dari struktur pembangunan negara yang tidak mampu menciptakan pendidikan yang merata dan berkelanjutan. Pada akhirnya, penelitian ini mengonfirmasi urgensi pergeseran paradigma *state security* menuju *human security*, serta dari ancaman militer menuju ancaman struktural. Ketika pendidikan gagal dipertahankan sebagai sistem perlindungan sosial, maka kekosongan ruang tersebut akan menjadi medan yang terus dieksploitasi oleh aktor non negara seperti kelompok Boko Haram. Remaja yang teralienasi secara struktural akan senantiasa mencari ilusi harga diri dan jalan hidup alternatif yang membuat mereka merasa lebih berharga di pelukan kelompok ekstrem. Fenomena ini tidak lepas dari realitas bahwa negara terlebih dahulu absen dalam menjamin eksistensi mereka sebagai individu yang bermartabat.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Sebagai kesimpulan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa keterbatasan akses pendidikan pada fase *post-compulsory education* di Nigeria Utara menimbulkan dampak serius terhadap keamanan manusia. Meskipun fenomena ini kerap diklaim sebagai kegagalan pembangunan pendidikan, namun pada kenyataannya, hilangnya jaminan pendidikan oleh negara merupakan wujud kekerasan struktural dan kekosongan institusional. Terputusnya akses pendidikan bagi remaja saat menginjak usia 15 tahun membuktikan bahwa negara lalai dalam menyediakan perlindungan sosial dasar di masa transisi yang kritis. Kekosongan

institusional yang tidak ditangani dengan baik memicu deprivasi multidimensional, mulai dari hilangnya ruang sosial, munculnya krisis identitas serta keterasingan struktural yang berkontribusi pada kerentanan yang dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis transnasional seperti Boko Haram sebagai aktor substitusi.

Berlandaskan uraian di atas, penelitian ini menemukan dan mengindikasikan perlunya redefinisi strategi keamanan dan pendidikan di Nigeria Utara. Penggunaan instrumen militeristik yang selama ini mendominasi perlu dievaluasi secara kritis. Oleh karena itu, temuan ini merekomendasikan perlunya intervensi struktural yang komprehensif dari pemerintah untuk menutup celah *institutional abandonment* pada fase *post-compulsory education*, sehingga rantai eksploitasi kerentanan remaja oleh kelompok ekstremis dapat diputus. Langkah intervensi tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa poin utama.

Pertama, pemerintah Nigeria perlu memperluas jaring pengaman pendidikan (*educational safety net*) agar melampaui pendidikan dasar, dengan mengintegrasikan pendidikan vokasi dan pemberdayaan berbasis komunitas. Hal ini krusial untuk menambal kekosongan pasca pendidikan wajib, sehingga remaja memiliki kemandirian ekonomi dan *social anchoring* alternatif. Kedua, perlu adanya reformulasi program pasca konflik seperti *Operation Safe Corridor* agar tidak hanya berfokus pada rehabilitasi eks kombatan. Program ini direkomendasikan untuk menitikberatkan pada intervensi pencegahan yang menjamin hak pemuda di kawasan rentan demi menghindari kecemburuan struktural. Terakhir, orientasi bantuan keamanan di level regional maupun internasional perlu diorientasi menjadi investasi jangka panjang untuk memperkuat infrastruktur keamanan manusia.

Dalam hal keterbatasan, penelitian ini masih sepenuhnya bersandar pada analisis data sekunder dengan lingkup yang eksklusif pada dinamika kelompok Boko Haram di Nigeria Utara. Fakta ini mengharuskan adanya kehati-hatian apabila simpulan penelitian hendak digeneralisasi pada kasus ekstremisme di negara atau kawasan lain yang memiliki latar belakang sejarah serta sosial politik yang berbeda. Untuk menutupi celah tersebut, penelitian berikutnya direkomendasikan untuk melakukan studi komparatif terkait efek kekosongan institusional pada masa transisi remaja di berbagai zona konflik lain. Terakhir, penggunaan pendekatan pengumpulan data primer langsung dari lapangan sangat diharapkan pada kajian masa mendatang. Langkah ini penting untuk memperkaya diskursus literatur Hubungan Internasional, terutama dalam memetakan korelasi langsung antara kebijakan pendidikan di dalam negeri dengan ancaman keamanan di tingkat transnasional.

## DAFTAR REFERENSI

- Afzal, M. (2020). From “Western education is forbidden” to the world’s deadliest terrorist group. *Foreign Policy at Brookings*, (April), 16–18. [https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/04/FP\\_20200507\\_nigeria\\_boko\\_haram\\_afzal.pdf](https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/04/FP_20200507_nigeria_boko_haram_afzal.pdf)
- Akinyetun, T., Ebomoyi, I., Ambrose, & Iyase, O. (2025). *FROM SURRENDER TO SOCIAL SUSPICION . REINTEGRATION , STATE CREDIBILITY , AND HUMAN SECURITY IN BOKO HARAM-AFFECTED COMMUNITIES*. XIX(2), 268–285. <https://doi.org/https://doi.org/10.54989/stusec.2025.19.02.17>
- Akowe, O. M. (2024). Insurgency i n Nigeria , Boko Haram ’ s Operation s and the Future Outlook. *International Journal of Politics and Security*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.53451/ijps.983712>
- Anggaraa, Dianita Maharani, Mahesa, G. (2024). *Kebijakan Penanganan Kelompok Teroris Boko Haram pada Masa Kepemimpinan Muhammadu Buhari : Sebuah Analisis Aktor Spesifik*. 9(1), 100–112. <https://doi.org/10.22303/pir.v8i2.93>
- Bertoni, E., Di Maio, M., Molini, V., & Nisticò, R. (2019). Education is forbidden: The effect of the Boko Haram conflict on education in North-East Nigeria. *Journal of Development Economics*, 141, 4. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.06.007>
- Ike, T. J., Jidong, D. E., Ike, M. L., Christopher Francis, & Ayobie, E. E. (2022). Reintegration of former Boko Haram members and combatants in Nigeria: An interpretative phenomenological analysis of community members experiences of trauma Reintegration of former Boko Haram members and combatants in Nigeria: An interpretative phenomenon. *Third World Quarterly*, 43(12), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01436597.2022.2109459>
- Ikpe, E., Adegoke, D., Olonisakin, F., & Aina, F. (2023). Understanding Vulnerability to Violent Extremism : Evidence from Borno State , Northeastern Nigeria Understanding Vulnerability to Violent Extremism: *African Security*, 16(1), 5–31. <https://doi.org/10.1080/19392206.2023.2185746>
- Ishaku, B., Aksit, S., & Maza, K. D. (2021). *The Role of Faith-Based Organizations in Counter-Radicalization*. 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel12111003>
- Kukawa, M. A., Adamu, O. B., & Gajiram, M. A. (2025). Causes of High Out-of-School Children in Northern Nigeria and Its Implications for Present and Future. *African Journal of Humanities and Contemporary Education Research*, 19(1), 235–236. <https://doi.org/10.62154/ajhcer.2025.019.01023>
- Kusuma, A. S. (2022). HUMAN SECURITY DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL : *Pustaka Ilmu*, 4–10. [https://www.researchgate.net/publication/358929457\\_Human\\_Security\\_dalam\\_Hubungan\\_Internasional\\_Sebuah\\_Pengantar](https://www.researchgate.net/publication/358929457_Human_Security_dalam_Hubungan_Internasional_Sebuah_Pengantar)
- Lendvai Bainton, N., Kwon, H. ju, & Kennett, P. (2026). *Critical Human Security , State Capacity , and Post- Pandemic Policy Challenges in Europe and East Asia*. (2025). <https://doi.org/10.1017/S1474746425000259>
- Musa, A. (2025). Human Security and Non-State Actors in Africa : A Double-Edged Sword under Neoliberal Governance. *Afropolitanjournals*, 9(7), 300,306. <https://doi.org/10.62154/ajhcer.2025.019.01023>

- Nwoke, C., Oyiga, S., & Cochrane, L. (2024). *Assessing the phenomenon of out- - school children in Nigeria: Issues , gaps and recommendations*. (October), 22. <https://doi.org/10.1002/rev3.70011>
- Ogunnubi, O., & Aja, U. A. (2022). The de-radicalization , rehabilitation and reintegration project in Nigeria ’ s counter- terrorism strategy : Operation Safe Corridor in context. *African Identities*, 00(00), 1–17. <https://doi.org/10.1080/14725843.2022.2125365>
- Ogunode, N. J., Adanna, C. M., & Ayoko, V. O. (2022). Out of School Children in Nigeria: Causes, Social Implications and Way Forward. *International Journal on Integrated Education*, 5(12), 82–83. <https://journals.researchparks.org/index.php/IJIE>
- Opene, N. D., & Izu, S. I. (2025). 张润锋 1 赵永峰 2 陈江义 1. *Journal of Xi’an Shiyou University, Natural Science Edition*, 44(1), 194. <https://www.xisdxjxsu.asia/viewarticle.php?aid=3791>
- Rasidi, A., Mataram, I. N., Mataram, U., & Manusia, S. D. (2021). *Standar kualitas pendidikan dasar di nigeria: studi kepustakaan*. 13(1), 43. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/elmidad.v13i1.3456>
- Umar, S. I., & Maaji, S. M. (2025). *From sacred education to street exploitation : the Almajiri Crisis in Nigeria as a nexus of public health failures , legal paralysis , and global security risks. 1*, 1–21.
- UNICEF. (2022). *JUNE 2022 Education opportunities for Out-of-School Children ( OOSC ) BASIC EDUCATION OOSC AT A Facts about OOSC POLICY LANDSCAPE FOR BARRIERS AND EDUCATION PRIORITIES FOR 2022*. (June), 1. [https://www.unicef.org/nigeria/media/7746/file/UNICEF Nigeria Cheat Sheet: Out-of-school Children.pdf](https://www.unicef.org/nigeria/media/7746/file/UNICEF%20Nigeria%20Cheat%20Sheet%20Out-of-school%20Children.pdf)
- Woelandari, D. R., Putri, R., Apriliantini, R., Hii, H., & Tebai, N. N. P. T. (2021). ANALYSIS OF THE COUNTER-TERRORISM POLICY BY THE NIGERIAN GOVERNMENT IN HANDLING BOKO HARAM GROUP BOKO HARAM. *Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 26(2), 70–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.26418/PROYEKSI.V26I2.2903>